



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DISPUSAKA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Tahun 2023





KATA PENGANTAR

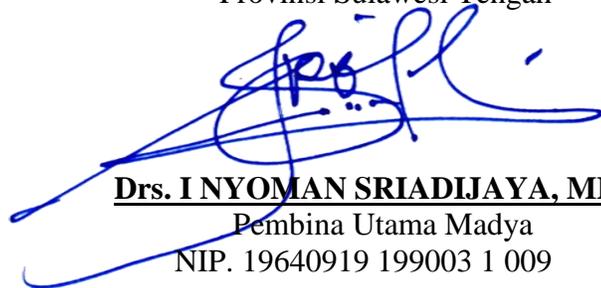
Bismillahirrahmanirrahiim

Puji syukur pertama – tama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan. Sebagai sebuah organisasi pemerintah dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai Pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggung-jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan anggaran yang dibiayai dari APBD Tahun 2023, laporan kinerja ini disusun sebagai akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yakni Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.

Palu, Januari 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640919 199003 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.2.1 Tugas dan Fungsi	4
1.2.2 Struktur Organisasi	5
1.3 Isu-isu Strategis	9
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana	19
1.4.1 Sumber Daya Manusia	19
1.4.2 Sarana Prasarana	23
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	32
2.1.1 Tujuan	32
2.1.2 Sasaran	32
2.1.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	33
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	34
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	36
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	41
2.5 Perjanjian Kinerja	47



BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	Capaian Kinerja	49
3.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022	49
3.1.2	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	51
3.1.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	51
3.1.4	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	54
3.1.5	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	54
3.2	Realisasi Anggaran	63
BAB IV	PENUTUP	72



DAFTAR TABEL

TABEL I

Tabel I.1.	Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin	19
Tabel I.2.	Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pangkat dan Golongan	20
Tabel I.3.	Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel I.4.	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	21
Tabel I.5.	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel I.6.	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Tabel I.7.	Jumlah Pejabat Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	23
Tabel I.8.	Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	23

TABEL II

Tabel II.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah “Dinas Perpustakaan dan Kearsipan”	34
Tabel II.3.	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	36
Tabel II.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	41
Tabel II.5.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	47



TABEL III

Tabel III.1. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis DISPUSAKA Prov.Sulteng Tahun 2022	49
Tabel III.2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya	51
Tabel III.3. Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026	52
Tabel III.4. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2022	55
Tabel III.5. 2022 Anggaran dan Realisasi Belanja per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pemerintahan dibidang perpustakaan. Dengan kedudukan tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan bidang perpustakaan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Sebagai rencana pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pembangunan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan memberikan arah Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan bagian terpenting dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah Yaitu : **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**.

Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun



2023. Laporan ini merupakan bahan pengukuran kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang perpustakaan serta sebagai bahan evaluasi sampai sejauhmana realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Tahun Anggaran 2023.

Eksistensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan ditindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan penyelenggaraan memberikan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

Potensi dari permasalahan pembangunan daerah pada umumnya adalah timbul dari adanya faktor internal maupun eksternal dimana kekuatan belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak teratasi, peluang yang tidak dimanfaatkan maupun tantangan yang tidak diantisipasi.

Kinerja pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode lima tahun sebelumnya masih menyisakan berbagai permasalahan yang harus dicermati sehingga dapat menjadi penentu keberhasilan dimasa yang akan datang. Identifikasi permasalahan urusan perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja



pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

1. Koleksi judul buku/disiplin ilmu diperpustakaan relatif masih terbatas dibandingkan dengan variasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui koleksi bahan pustaka.
2. Minat masyarakat memanfaatkan koleksi buku bacaan diperpustakaan masih perlu ditingkatkan.
3. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih terbatas.
4. Belum optimalnya implementasi kebijakan nasional implementasi di daerah tentang kegiatan gemar membaca bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
5. Masih terbatasnya anggaran operasional yang tersedia baik APBD maupun APBN dalam upaya peningkatan layanan dan pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pembinaan semua jenis perpustakaan.
6. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih terbatas.
7. Terbatasnya sarana layanan informasi arsip, sehingga pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat belum optimal.
8. Budaya menempatkan kearsipan sebagai bagian dari tata kelola dokumen yang bernilai strategis dari sisi hukum dan nilai historis masih rendah.
9. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang Perpustakaan (Pustakawan) dan Kearsipan (Arsiparis).



1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk karena adanya konsekuensi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berfungsi sebagai :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan kebudayaan



- kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut diatas, maka Struktur Organisasi



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan
 - a. Ketua Kelompok Kerja Sub.Bidang Deposit
 - b. Ketua Kelompok Kerja Sub.Bidang Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka
 - c. Ketua Kelompok Kerja Sub.Bidang Konservasi Bahan Perpustakaan
4. Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan
 - a. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Layanan dan Kerjasama Perpustakaan
 - b. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Alih Media
 - c. Ketua Kelompok Kerja Sub Otomasi Perpustakaan
5. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

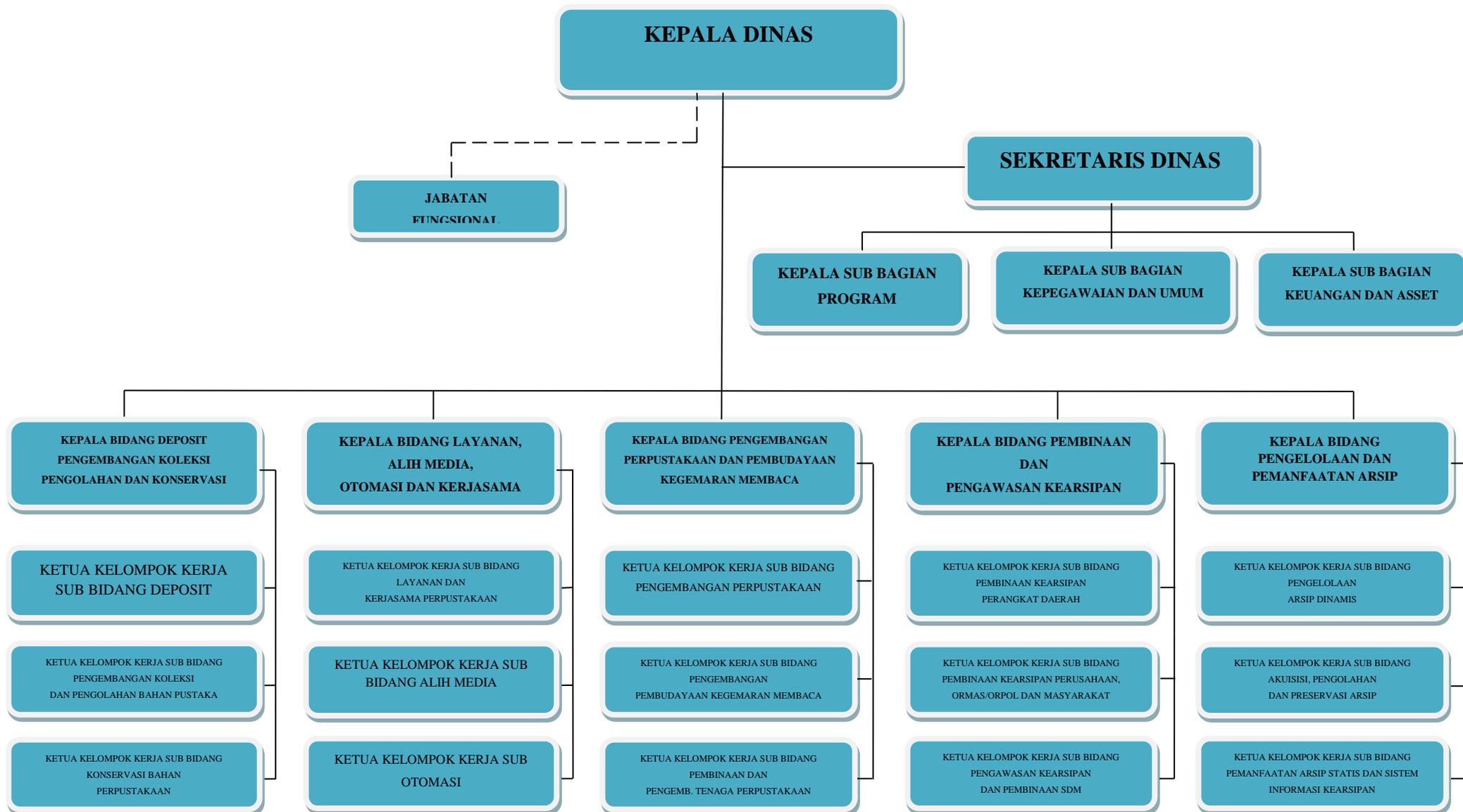


- a. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pengembangan Perpustakaan
 - b. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan
 - c. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca
6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
- a. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah
 - b. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat.
 - c. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pengawasan Kearsipan dan Pembinaan SDM
7. Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip
- a. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis
 - b. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip
 - c. Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Pemanfaatan dan Sistem Informasi Kearsipan
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Jabatan Fungsional Pustakawan
 - b. Jabatan Fungsional Arsiparis



STRUKTUR ORGANISASI (GAMBAR)

(terlampir)





1.3 Isu-isu Strategis

Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan serta pengelolaan kearsipan yang baik dan benar adalah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas serta berdaya saing dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang ingin dicapai adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan diterbitkannya undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta diakomodir didalam Perda Provinsi Sulawesi Tengah No 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi SulawesiTengah. Sejalan dengan Reformasi birokrasi yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan good governance, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberatasan KKN secara terarah, terpadu dan sistematis. Dalam penerapannya, perlu ada perubahan mindset dan orientasi birokrasi dari yang melayani kekuasaan menjadi melayani masyarakat/ meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan publik menjadi isu kian strategis manakala kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini, sudah pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja perpustakaan dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan



dan kearsipan, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab padapembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta penyelamatan sumber informasi primer maupun sekunder. Dan jika dicermati secara seksama, maka terdapat hal-hal penting yang menjadi isu-isu strategis.

A. Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan

Peningkatan Sumber Daya manusia utama yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Pustakawan dan Arsiparis. Keduanya merupakan tulang punggung bagi pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kedua sumber daya tersebut ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini perlu dilakukan guna menyediakan sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan yang tangguh serta siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan globalisasi. Pustakawan sebagai motor penggerak dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat, perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sehingga pada gilirannya mampu membangun jaringan masyarakat gemar membaca di seluruh provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui SDM perpustakaan yang dimiliki harus mampu mendorong terjadinya proses transformasi yang menjadikan perpustakaan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Perpustakaan harus mampu menjadi sarana pembangun pemahaman masyarakat, tentang pentingnya esensi keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap kepentingan publik. Perpustakaan juga harus mampu mendorong meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, sehingga



menjadi bekal bagi pembangunan bangsa seutuhnya. Pembinaan terhadap SDM perpustakaan mutlak diperlukan. Bukan hanya pada pejabat fungsional Pustakawan, tetapi juga pada pembuat kebijakan dan petugas teknis pengelola perpustakaan yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan terdapat di hampir pelosok daerah. Karena itu berbagai bentuk pelatihan tentang perpustakaan sudah dipersiapkan untuk mendidik dan meningkatkan baik kualitas dan kuantitas tenaga terdidik di bidang perpustakaan.

Arsiparis sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan kearsipan, juga memiliki tugas yang tak kalah pentingnya dengan Pustakawan. Merekalah tulang punggung pengelolaan kearsipan di seluruh instansi pemerintah. Sayangnya, jumlah tenaga fungsional ini semakin berkurang dengan berbagai alasan. Hal ini perlu segera diantisipasi dengan penciptaan tenaga fungsional baru, sehingga kebutuhan lembaga terhadap tenaga khusus ini terpenuhi. Munculnya Kepmenpan No.PER/3/M.PAN/3/2009 tentang jabatan fungsional Arsiparis dan angka kreditnya, jelas makin menghambat upaya Pemprov. Kaltim menambah jumlah arsiparis tingkat terampil. Karena itu pemerintah provinsi perlu membuat kebijakan baru dengan memberi kemudahan bagi PNS yang ingin beralih menjadi fungsional Arsiparis. Kebijakan ini meliputi peningkatan kesejahteraan, kemudahan dalam berkarier serta pembinaan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan, untuk memberi jaminan pada arsiparis agar dapat berkomitmen dengan baik pada tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Keberadaan Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.



Apalagi di tengah gencarnya upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat menuju good governance. Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan perlu diberdayakan sebaik-baiknya. Mereka perlu didorong agar mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Pemahaman dan penguasaan teknologi informasi mutlak diperlukan, sehingga mereka tidak jauh ketinggalan jaman. Apalagi dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lingkup informasi menjadi lebih beragam.

Pustakawan dan Arsiparis harus memiliki ethos kerja tinggi. Mereka haruslah aplikatif, selektif dan koordinatif dalam menyeleraskan ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada. Tuntutan masyarakat akan layanan informasi di tengah era keterbukaan informasi, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dipahami sebagai tanggung jawab. Ini menjadi tantangan, agar ke depan mampu menyediakan informasi bagi publik. Sebagai pengelola informasi, Pustakawan dan Arsiparis harus mampu meningkatkan produktivitas pengolahan khasanah dan koleksinya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Karena itu, kemampuan teknis pengolahan, strategi dan prioritas tenaga pengolah perlu senantiasa ditingkatkan. Kesadaran tentang pentingnya, perpustakaan dan kearsipan perlu dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan baru yang berpihak pada pengembangan perpustakaan dan kearsipan. Pustakawan, Arsiparis, tenaga teknis



pengelola perpustakaan dan tenaga teknis pengelola kearsipan adalah aset penting bagi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Mereka harus diberi motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka lebih leluasa berkisah dan berkreasi dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Karena itu sudah sewajarnya pemerintah provinsi memberi apresiasi tersendiri, agar kinerja perpustakaan dan kearsipan dapat berhasil dan berdayaguna dengan baik.

B. Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan

Teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang. Sudah saatnya perpustakaan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) ini untuk pengelolaannya. Sistem otomatisasi dan digitalisasi bahan pustaka perlu dilakukan. E-Library menjadi begitu penting untuk pengembangan layanan perpustakaan di tengah maraknya era gadget dewasa ini. ELibrary memungkinkan pengunjung perpustakaan bisa mengakses buku pustaka, tanpa harus datang ke perpustakaan. Merujuk dari perkembangan teknologi tersebut maka lahirlah iKaltim, sebuah sarana membaca yang memudahkan para pemustaka untuk membaca di manapun dan kapan saja. Pada saat ini, perpustakaan sudah dikelola secara computerized. Pengguna yang datang ke perpustakaan tidak lagi mencari buku secara manual dengan katalog. Data buku koleksi perpustakaan sudah disimpan ke dalam database, sehingga pengguna bisa mengaksesnya melalui komputer yang telah disediakan.

Demikian pula hal berbicara tentang kearsipan peraturan perundangan tentang kearsipan masih terbatas. Hal ini cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu Dinas Perpustakaan Dan



Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya menghasilkan produk-produk hukum kearsipan yang nanti akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kearsipan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui produk hukum kearsipan diharapkan, sistem kearsipan dapat berjalan dengan baik di setiap Perangkat Daerah. Dengan begitu tertib arsip dan administrasi dapat terwujud. Jika tertib arsip dan tertib administrasi dapat terwujud di setiap Perangkat Daerah, maka manajemen kearsipan dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Dan pemerintahan yang baik dan bersih , seperti yang diharapkan dalam reformasi birokrasi dapat terwujud.

Penyelamatan arsip yang bernilai dari lembaga pemerintah maupun swasta juga dapat dilakukan sesuai prosedur. Hal ini sudah tentu memudahkan lembaga kearsipan melakukan penilaian dan pengakuisisian terhadap arsip-arsip tersebut.

Di satu sisi, dengan sistem administrasi kearsipan yang baik, setiap Perangkat Daerah bisa dengan mudah melakukan penyusutan terhadap arsip-arsip yang dimiliki. Arsip yang masih memiliki nilai bagi kelangsungan organisasi bisa disimpan sebagai arsip dinamis. Sedangkan arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun tetapi bernilai guna kesejarahan dapat disimpan di lembaga kearsipan, melalui akuisisi. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun baik bagi lembaga pencipta maupun lembaga kearsipan, dapat dimusnahkan. Tentu saja hal ini dilakukan setelah melalui penilaian oleh tim yang telah ditentukan.

Fenomena Pilkada dapat dijadikan sebagai momen bagi lembaga



kearsipan untuk mendapatkan arsip bernilai informasi tinggi. Arsip harus sudah dikelola sejak diciptakan. Dengan begitu, akan memudahkan petugas ketika melakukan pendataan hingga penataan arsip di KPUD.Desa sebagai wilayah administrasi terkecil dalam lembaga pemerintahan, juga perlu dikembangkan sistem administrasinya. Program Arsip Masuk Desa menjadi upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui pembinaan kearsipan terhadap Sekretaris Desa di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah.

Jika setiap Perangkat Daerah dan lembaga-lembaga penghasil arsip dapat menjalankan manajemen arsip secara baik dan benar, tentu upaya penyelamatan arsip yang bernilai guna dapat dicapai.Dengan berjalannya manajemen kearsipan, sudah tentu memerlukan sarana prasarana yang memadai untuk penyimpanannya. Dan ini sering menjadi kendala bagi lembaga, sehingga banyak arsip ditemukan dalam kondisi yang rapuh bahkan kacau karena tidak memiliki sarana prasarana yang memadai. Jika ini terjadi pada arsip-arsip yang bernilai guna, tentu akan membahayakan penyelamatan aset penting negara. Karena itu pengelolaan arsip harus diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana serta upaya pelestariannya.

Di sisi lain, hadirnya UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan. Banyak lembaga yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi lembaganya serta menghasilkan arsip elektronik. Di satu sisi, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Sudah tentu



ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera mempersiapkan diri dalam pengelolaan arsip elektronik tersebut.

C. Budaya Baca, Akses Perpustakaan dan Dimensi Informasi serta pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno (Manuskrip)

Berdasarkan hasil survei/ riset UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa minat baca masyarakat yang paling rendah di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) adalah negara Indonesia. Rendahnya minat baca ini dibuktikan dengan indeks membaca masyarakat Indonesia yang baru sekitar 0,001, artinya dari seribu penduduk, hanya ada satu orang yang masih memiliki minat baca tinggi. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan angka minat baca di Singapura yang memiliki indeks membaca sampai 0,45. Sementara itu, berdasarkan studi Most Littered Nation In the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Hanya setingkat di atas Botswana (61).

Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kurangnya kesadaran publik akan arti penting membaca bagi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan diri maupun bangsa. Selain itu, maraknya media elektronik (televisi dan internet) yang kebanyakan berisi tayangan hiburan, pornografi, iklan komersial, dan hal-hal hedonistis lainnya menjauhkan masyarakat dari budaya membaca.



Faktor lain yang menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia adalah kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi menyebabkan akses masyarakat terhadap buku-buku bermutu semakin sulit, karena untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sudah kesulitan, apalagi membeli koran, buku, atau bacaan lainnya. Rendahnya minat baca ini akan mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia, karena masyarakat Indonesia tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia, di mana pada akhirnya akan berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia dapat mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara tetangga, perlu menumbuhkan minat baca sejak usia dini sebagai salah satu upaya penanaman rasa senang membaca pada diri individu

Pemanfaatan layanan perpustakaan baru sebatas masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang tinggal jauh secara geografis dari pusat kota seperti masyarakat urban, masyarakat pedesaan, perbukitan, maupun daerah perbatasan dan tertinggal lainnya masih termarginalisasi dalam akses sumber-sumber bacaan dan informasi. Hal ini disebabkan berbagai faktor yaitu (1) daya beli masyarakat yang rendah terhadap bahan bacaan, (2) jumlah terbitan nasional terbatas setiap tahun, disamping pendistribusian yang tidak merata menjangkau komunal masyarakat, (3) keinginan atau minat masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan membaca dan menulis, serta (4) perpustakaan dalam memfasilitasi kebutuhan membaca belum tersedia secara maksimal.



Instrumen strategis dalam pemenuhan kebutuhan bacaan masyarakat adalah penguatan kelembagaan perpustakaan serta diversifikasi layanan perpustakaan, sehingga akses masyarakat terhadap bacaan dan sumber informasi lainnya dapat diakses dengan cepat dan murah. Kebutuhan minimal perpustakaan di masyarakat ditinjau dari aspek kelembagaan dan administrasi pemerintahan memerlukan kurang lebih 794.023 perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sekarang ini belum representatif. Salah satunya perpustakaan sekolah baru mencapai 5.74 % yang memiliki perpustakaan. Sedangkan perpustakaan masyarakat (perpustakaan kecamatan/ desa/ kelurahan/rumah ibadah) baru mencapai 0.28 % yang memiliki perpustakaan.

D. Kelembagaan Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, maka telah ditetapkan perpustakaan sebagai salah satu urusan wajib. Sehubungan dengan itu, sebagai urusan wajib bagi daerah otonom dalam hal pelayanan publik yang menunjang keberhasilan di bidang pendidikan maka sudah saatnya Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperhatikan pengembangan perpustakaan dan kearsipan, khususnya kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota. Saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah telah terbentuk 9 Perpustakaan Umum Kab/Kota dari 10 Kab/Kota yang ada.



1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Perubahan Nomenklatur dan Struktur Organisasi memberikan dampak Perubahan Komposisi dan jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh tenaga teknis perpustakaan dan pustakawan serta arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan. Adapun jumlah pegawai yang bekerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 99 orang terdiri dari laki-laki 45 orang dan perempuan 54 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel I.1. Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN				TOTAL
		PRIA	%	WANITA	%	
1	DISPUSAKA	45	45.45	54	54.55	99



Tabel I.2. Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	GOLRU	JENIS KELAMIN				JMLH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	I/a	0	-	0	-	0
2	I/b	0	-	0	-	0
3	I/c	0	-	0	-	0
4	I/d	0	-	0	-	0
5	II/a	2	-	0	-	2
6	II/b	6	6.06	2	2.02	8
7	II/c	5	-	0	-	5
8	II/d	3	3.03	1		4
9	III/a	6	6.06	4	4.04	10
10	III/b	5	5.05	5	5.05	10
11	III/c	4	4.04	18	18.18	22
12	III/d	5	5.05	13	13.13	18
13	IV/a	6	6.06	3	3.03	9
14	IV/b	2	2.02	7	7.07	9
15	IV/c	0	-	1	1.01	1
16	IV/d	1	1.01	0	-	1
17	IV/e	0	-	0	-	0
Total		45	45.45	54	54.55	99



Tabel I.3. Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PDDKN	JENIS KELAMIN				JMLH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	SD	0	0.00	0	-	0
2	SMP	0	0.00	0	-	0
3	SMA/SMK	16	16.16	7	7.07	23
4	D.I	0	0.00	0	-	0
5	D.II	0	0.00	0	-	0
6	D.III	2	2.02	6	6.06	8
7	SI / D.IV	16	16.16	32	32.32	48
8	S2	10	10.10	10	10.10	20
9	S3	0	0.00	0	-	0
TOTAL		47	43.93	60	56.07	107

Tabel I.4. Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

NO	ESS	FORMASI	TERISI	LOWONG	KETERANGAN
1	I.b	0	0	0	
2	II.a	1	1	0	
3	II.b	0	0	0	
4	III.a	6	6	0	
5	III.b	0	0	0	
6	IV.a	18	18	0	
TOTAL		25	25	0	



Tabel I.5. Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin

NO	ESS	PRIA	WANITA	JMLH	SDH PIM	BLM PIM	KETERANGAN
1	I.b	0	0	0	0	0	
2	II.a	1	0	1	1	0	PIM
3	II.b	0	0	0	0	0	
4	III.a	2	4	6	6	0	6 PIM
5	III.b	0	0	0	0	0	
6	IV.a	2	1	3	3	0	3 PIM
TOTAL		5	5	10	10	0	

Tabel I.6. Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PDDKN	ESELON				JMLH
		I	II	III	IV	
1	SMA/SMK	0	0	0	0	0
2	D.I	0	0	0	0	0
3	D.II	0	0	0	0	0
4	D.III	0	0	0	0	0
5	SI / D.IV	0	0	1	1	2
6	S2	0	1	5	2	8
7	S3	0	0	0	0	0
TOTAL		0	1	6	3	10



Tabel I.7. Jumlah Pejabat Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN						JMLH AHLI + TERAMPIL
		AHLI		JMLH AHLI	TERAMPIL		JMLH TERAMPIL	
		P	W		P	W		
1	PUSTAKAWAN	5	14	19	0	7	7	26
2	ARSIPARIS	3	5	8	1	1	2	10
TOTAL		8	19	27	1	8	9	36

Tabel I.8. Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	Struktural	5	5	10
2	Fungsional	9	29	36
3	Pelaksana	30	23	53
TOTAL		44	57	99

1.4.2 Sarana Prasarana

Selain dari pada itu didukung pula sarana dan prasarana yang memadai seperti :

1. Gedung Perpustakaan dan Arsip yang representatif terdiri dari
 - a. Gedung Administrasi dan Layanan Perpustakaan
 - b. Gedung Pengolahan, Penyimpanan dan Layanan Informasi Arsip
2. Koleksi Perpustakaan
 - a. Koleksi Umum : 68.174 judul 373.096 eks
 - b. Koleksi deposit : 5.601 judul 7.427 eks



3. Perlengkapan Mobiler

4. Kendaraan Operasional

- a. Mobil Perpustakaan Keliling : 3 unit
- b. Mobil Operasional : 4 unit
- c. Mobil Layanan Arsip Keliling : 1 unit

5. Perlengkapan mobiler penunjang kegiatan pelayanan perpustakaan dan kearsipan seperti Rak Buku, Lemari Buku, Lemari Display, Perangkat Audio Visual, Peralatan Jaringan Sistem Otomasi Perpustakaan (e-Library), Meja dan Kursi Baca, Lemari Katalog, Lemari Penyimpanan Arsip, Box Arsip, Meja Sirkulasi, dll.

6. Ruang layanan yang representatif terdiri dari :

- a. Ruang Layanan Koleksi Anak-Anak
- b. Ruang Layanan Koleksi Digital dan Layanan IT
- c. Koleksi CD/DVD
- d. Layanan akses internet
- e. Layanan database on-line
- f. Layanan koleksi umum
- g. Layanan koleksi rujukan (referensi)
- h. Layanan koleksi deposit Sulawesi Tengah
- i. Layanan terbitan berkala (majalah, surat kabar, jurnal dll)
- j. Audio visual untuk pemutaran film, CD dan DVD
- k. Diskusi/seminar/ pertemuan
- l. Corner Sulawesi Tengah



7. Sarana Penelusuran Informasi terdiri dari :

- a. Katalog on-line (OPAC = On-Line Public Access Catalogue)
- b. Bibliografi Nasional dan Daerah
- c. Katalog Induk Nasional dan Daerah
- d. Abstrak (sari karangan)

8. Fasilitas Lainnya

- a. Computer client dan hotspot : untuk akses internet dan akses koleksi CD/DVD
- b. Armada Mobil Perpustakaan Keliling
- c. Foto Copy : Melalui fasilitas ini koleksi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dicopy sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta dan peraturan yang berlaku pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Klinik Pustakawan : Fasilitas ini merupakan sarana komunikasi dan informasi kepustakawanan
- e. Ruang display buku baru
- f. Mushola, kantin, toko koperasi, dan toilet
- g. Pojok CSR (sarana bantuan dari beberapa pihak ketiga)

9. Pendayagunaan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan

Produk jasa layanan perpustakaan yang ditawarkan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk masyarakat Kalimantan Timur terdiri dari produk jasa layanan. Secara garis besar layanan yang diberikan dikelompokkan sebagai berikut



a. Layanan Sirkulasi

Layanan yang diberikan dalam bentuk jasa peminjaman dan pengembalian buku-buku umum maupun koleksi sekolah.

b. Layanan Referensi

Layanan yang menyediakan koleksi rujukan berupa buku-buku referensi seperti; kamus, ensiklopedia, biografi, direktori handbook dan lain-lain.

c. Layanan Perpustakaan Digital

Layanan yang menyediakan jasa akses internet, layanan koleksi digital edutainment dalam format VCD/DVD.

d. Layanan Wisata Perpustakaan

Layanan yang diberikan kepada pengunjung atau anggota perpustakaan khususnya anak-anak TK atau SD secara berkelompok untuk mendengarkan cerita/dongeng dan pemutaran film edukas.

e. Layanan Perpustakaan Keliling

Layanan peminjaman bahan pustaka umum maupun sekolah dengan menggunakan armada mobil Perpustakaan keliling yang diperuntukkan bagi masyarakat yang secara geografis dan sosial tidak terlayani oleh perpustakaan permanent

f. Layanan Informasi Koleksi Terbaru

Layanan yang menyediakan informasi tentang koleksi terbaru yang akan dilayankan pada masyarakat. Layanan ini dilaksanakan dalam



bentuk display buku-buku baru pada ruang lobby utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

g. Bimbingan Pemakai.

Layanan yang diberikan dalam bentuk memberikan arahan pemakai dalam mendayagunakan sumber daya informasi yang tersedia di perpustakaan.

h. Jasa Kearsipan dan Konsultasi Kearsipan

Layanan yang diberikan berupa konsultasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan kearsipan, sejak dari tata persuratan, pengurusan surat, pengelolaan arsip aktif, penanganan arsip inaktif sampai dengan penyusutan arsip/dokumen (termasuk penyusunan JRA)

i. Pembuatan Sistem Kearsipan

Layanan perancangan Sistem kearsipan yang dirancang dan dibuat sesuai dengan kondisi dan keinginan instansi masing-masing, sehingga akan membantu di dalam kelancaran kegiatan administrasi, karena sistem tersebut meliputi sejak arsip diciptakan, digunakan sampai dengan disusutkan.

j. Penyempurnaan Sistem Kearsipan

Layanan yang dipergunakan untuk menyempurnakan sistem yang telah ada dengan memperhatikan kaidah-kaidah kearsipan sehingga merupakan sistem yang aplikatif

k. Pembuatan SOP Kearsipan



Memberikan layanan pembuatan SOP kearsipan OPD, Badan Usaha dan Organisasi Pendidikan, Kemasyarakatan dan Politik.

l. Otomasi Kearsipan

Layanan penggunaan sarana elektronik guna mendukung pengelolaan arsip/dokumen agar informasinya dapat diakses dengan lebih cepat.

m. Pembenahan/ Penataan Arsip/ Dokumen

Layanan untuk membantu merekonstruksi/menata ulang dan melaksanakan pembenahan/penataan arsip/dokumen kacau secara tepat dan benar baik fisik maupun informasinya. Hasil dari pembenahan arsip/dokumen adalah tertatanya fisik dan informasi berupa daftar sebagai jalan masuk untuk penemuan kembali arsip/dokumen yang dapat dibuat secara manual maupun elektronik.

n. Penyimpanan Arsip/ Dokumen

Jasa layanan penyimpanan sekaligus layanan pemakaian arsip/dokumen, pengiriman boks dan pengambilan arsip/dokumen. Ruang penyimpanan dirancang dengan spesifikasi ruang tahan api dan menggunakan AC selama 24 jam untuk Magnetic Tape, Catridge, CD-Rom, Disket, Mikrofilm, Microfiche dan Arsip Vital;

o. Perawatan Arsip/Dokumen

Layanan jasa perawatan arsip/dokumen meliputi perawatan arsip /dokumen, fumigasi, laminasi arsip/dokumen tekstual/kertas yang telah rusak/rapuh, dan penjilidan arsip/dokumen serta pengujian arsip konvensional;



p. Reproduksi Arsip/ Dokumen

Layanan pengerjaan reproduksi arsip/dokumen dari berbagai ukuran dan jenis yang dibutuhkan, baik arsip tekstual maupun media baru.

q. Alih Media Arsip/ Dokumen

layann alih media arsip/dokumen dari media konvensional ke media digital.

r. Pemeliharaan dan Perawatan Pusat Arsip/ Dokumen

Bagi organisasi pemerintah maupun swasta yang sudah memiliki pusat arsip/dokumen sendiri, pada Bagian Layanan Kearsipan memberikan layanan jasa dalam pemeliharaan dan perawatan pusat arsip/dokumen.

s. Layanan Wisata Arsip

Memperkenalkan tentang informasi seputar dunia kearsipan serta pengenalan seputar sejarah di Provinsi Sulawesi Tengah dan di NKRI, baik melalui pemutaran film sejarah dan infomasi tentang kearsipan serta kunjungan pada Galery atau ruang pameran arsip. Diperuntukkan untuk masyarakat umum, Dunia Pendidikan, OPD dan Organisasi.

t. Layanan Pengadaan Peralatan/ Sarana Kearsipan

Menyediakan peralatan/sarana kearsipan baik untuk arsip tekstual maupun arsip media baru, seperti : Boks arsip, rak arsip, folder, guide, mikrofiche dll.



1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Rekomendasi tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi sakip tahun 2022 terhadap permasalahan dalam pencapaian sasaran/kinerja organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi sulawesi tengah, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Perencanaan Kinerja harus dipublikasikan tepat waktu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
 - b. Perjanjian Kinerja harus dipublikasikan tepat waktu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.
 - c. Cascading / Pohon Kinerja yang disusun harus dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021.
 - d. Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun harus dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan.
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Melakukan pemantauan/monitoring atas pengukuran capaian kinerja sampai unit dibawahnya secara berjenjang.
 - b. Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam pengukuran kinerja.
 - c. Memberikan reward dan punishment sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.
 - d. Mengupayakan agar pengukuran kinerja dapat berpengaruh terhadap penyesuaian Anggaran guna pencapaian kinerja.



- e. Memberikan pemahaman kepada semua pegawai agar peduli atas hasil pengukuran kinerja.
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Laporan kinerja yang disusun harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014), sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - b. Laporan kinerja harus diimplementasikan ke dalam Rencana Aksi dimonitor/dipantau secara berkala.
 - c. Laporan kinerja yang disusun harus direviu secara berjenjang.
 - d. Laporan kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional.
 - e. Pemanfaatan informasi kinerja dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, perbaikan kinerja dan penilaian kinerja.
 4. Evaluasi Kinerja
 - a. Melakukan dan mendokumentasikan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi.
 - b. Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi per tri wulan dan digunakan untuk mengendalikan kinerja dan menyusun alternatif perbaikan.
 - c. Hasil evaluasi rencana aksi didokumentasikan, ditindaklanjuti dan dilakukan monitoring secara tertulis.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

2.1.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil telaah Visi, Misi Gubernur Sulawesi Tengah maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah “**Terwujudnya pelayanan publik yang prima**”. Penetapan tujuan dari misi ini berdasarkan hasil telaah kesesuaian RJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan “Terwujudnya pelayanan publik yang prima” Maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran strategis jangka menengah yang merupakan indikator pencapaian hasil



yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Sasaran yang akan menjadi indikator ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

Sasaran yang akan menjadi indikator ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu:

1. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan yang representatif.
2. Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi.

2.1.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya.



2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Konsep dan kerangka strategi manajemen Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, disusun atas dasar permasalahan dan isu - isu strategis nasional yang ada dan dengan memperhatikan sasaran - sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun mendatang, guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah, terukur dan sistematis dalam menentukan strategi pencapaian tujuan, melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan serta usulan sesuai kebutuhan dan lokalitas dari berbagai komponen masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Analisis permasalahan dan isu-isu strategis tersebut akan menjadi basis utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk memberikan prioritas untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan harus dipedomani bersama oleh seluruh Perangkat Daerah yang selanjutnya akan



dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 9. sebagai berikut:

Tabel II.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah “Dinas Perpustakaan dan Kearsipan”

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perpustakaan	Meningkatnya Standar Pelayanan Publik	Mengembangkan layanan perpustakaan digital dan pembudayaan gemar membaca
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan yang representatif			Mengembangkan literasi berbasis inklusi sosial
				Meningkatkan pelestarian karya cetak dan naskah kuno milik daerah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyimpanan perawatan dan pelestarian naskah kuno
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	Meningkatnya penciptaan arsip dan LKD yang memperoleh kualifikasi pengelolaan kearsipan baik	Meningkatkan pengelolaan arsip dan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan	Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan statis
					Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan



2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 terdiri dari beberapa prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026. Pemenuhan persentase peningkatan minat baca masyarakat dan pemenuhan persentase OPD yang mengelola arsip daerah sesuai standart menjadi prioritas dalam mendukung terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing.

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan terkait langsung pencapaian sasaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 10. sebagai berikut:

Tabel II.2. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (-)
1	2	3	4	5	6
		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 18,102,346,488	Rp 20,188,867,824	Rp 2,086,521,336
	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan yang Representatif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Rp 19.726.166.035	Rp 20.716.063.945	Rp 989.897.910
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 17.436.622.585	Rp 17.392.160.926	Rp 44.461.659
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 428.771.000	Rp 666.813.750	Rp 238.042.750
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 10.650.000	Rp 24.722.750	Rp 14.072.750
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 7.620.000	Rp 7.620.000	Rp -
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Rp 10.280.000	Rp 10.280.000	Rp -



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 153.671.000	Rp 309.581.000	Rp 155.910.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 246.550.000	Rp 314.610.000	Rp 68.060.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 15.010.521.5999	Rp 14.589.405.086	Rp 421.116.513
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 13.279.437.599	Rp 12.754.061.186	Rp 525.376.413
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.401.144.000	Rp 1.401.144.000	Rp -
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 66.000.000	Rp 113.679.900	Rp 47.679.900
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 263.940.000	Rp 320.520.000	Rp 56.580.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 42.920.000	Rp 42.920.000	Rp -
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 42.920.000	Rp 42.920.000	Rp -
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 632.698.984	Rp 713.868.984	Rp 81.170.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 140.703.600	Rp 174.733.600	Rp 34.030.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 35.357.134	Rp 35.357.134	Rp -
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 28.926.250	Rp 28.926.250	Rp -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 427.712.000	Rp 474.852.000	Rp 47.140.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 208.624.702	Rp 198.601.806	Rp 10.022.896
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 208.624.702	Rp 198.601.806	Rp 10.022.896
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 474.560.800	Rp 479.775.800	Rp 5.215.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 434.710.800	Rp 434.710.800	Rp -
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 39.850.000	Rp 45.065.000	Rp 5.215.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 638.525.500	Rp 700.775.500	Rp 62.250.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 131.400.000	Rp 131.400.000	Rp -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 149.680.000	Rp 211.930.000	Rp 62.250.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Tahun 2023

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 287.445.500	Rp 287.445.500	Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000	Rp -
2.	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan yang Representatif	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 1.985.515.550	Rp 2.855.910.450	Rp 870.394.900
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 584.946.750	Rp 1.206.955.850	Rp 622.009.100
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Rp 65.295.000	Rp 65.295.000	Rp -
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Rp 17.224.000	Rp 390.527.200	Rp 373.303.200
		Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rp 74.282.350	Rp 231.213.250	Rp 156.930.900
		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Rp 8.640.000	Rp 8.640.000	Rp -
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 196.898.000	Rp 288.634.000	Rp 91.736.000
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 145.134.000	Rp 145.134.000	Rp -
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 77.473.400	Rp 77.512.400	Rp 39.000
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Rp 1.400.568.800	Rp 1.648.954.600	Rp 248.385.800
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Rp 369.267.850	Rp 418.854.800	Rp 49.586.950
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Rp 20.584.500	Rp 29.009.500	Rp 8.425.000
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp 354.793.600	Rp 519.949.000	Rp 165.155.400
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Rp 655.922.850	Rp 681.141.300	Rp 25.218.450
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rp 304.027.900	Rp 467.992.569	Rp 163.964.669



		Pelestarian karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Provinsi	Rp 89.999.900	Rp 90.000.000	Rp 100
		Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Rp 89.999.000	Rp 90.000.000	Rp 100
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Rp 130.022.000	Rp 130.046.000	Rp 24.000
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalimediaan Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestariakan dan Didayagunakan	Rp 44.030.000	Rp 44.030.000	Rp -
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 84.006.000	Rp 247.946.569	Rp 163.940.569
		Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Rp 84.006.000	Rp 247.946.569	Rp 163.940.569
4.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN	Rp 1.094.540.916	Rp 1.819.176.366	Rp 724.635.450
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 921.104.266	Rp 1.628.559.716	Rp 707.455.450
		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Rp 364.627.900	Rp 390.713.900	Rp 26.086.000
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Rp 51.569.200	Rp 51.569.200	Rp -
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Rp 24.870.000	Rp 24.870.000	Rp -
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Rp 288.188.700	Rp 314.274.700	Rp 26.086.000
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Rp 48.081.000	Rp 80.901.000	Rp 32.820.000
		Pengumpulan dan Penyimpanan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Rp 19.026.000	Rp 19.026.000	Rp -
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Rp 29.055.000	Rp 61.875.000	Rp 32.820.000
		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Rp 508.395.366	Rp 1.156.944.816	Rp 648.549.450
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Rp 104.024.666	Rp 103.905.866	Rp 118.800
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Rp 404.370.700	Rp 1.053.038.950	Rp 648.668.250
5.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan,	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp 173.436.650	Rp 190.616.650	Rp 17.180.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Perindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Rp 25.934.550	Rp 25.934.550	Rp -
	Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Rp 22.032.000	Rp 22.032.000	Rp -
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Rp 3.902.550	Rp 3.902.550	Rp -
	Perindungan dan penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Provinsi	Rp 69.899.950	Rp 87.079.950	Rp 17.180.000
	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Rp 17.580.000	Rp 34.760.000	Rp 17.180.000
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Rp 52.319.950	Rp 52.319.950	Rp -
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi Yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Rp 26.870.800	Rp 26.870.800	Rp -
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Rp 4.075.400	Rp 4.075.400	Rp -
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Rp 4.075.400	Rp 4.075.400	Rp -
	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Rp 18.720.000	Rp 18.720.000	Rp -
	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Rp 22.906.400	Rp 22.906.400	Rp -
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp 17.350.000	Rp 17.350.000	Rp -
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp 5.556.400	Rp 5.556.400	Rp -
	Pencarian Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang	Rp 27.824.950	Rp 27.824.950	Rp -
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Rp 16.838.000	Rp 16.838.000	Rp -



	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Rp 5.135.950	Rp 5.135.950	Rp -
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Rp 5.851.000	Rp 5.851.000	Rp -
Jumlah		Rp 20.820.706.951	Rp 22.535.240.311	Rp 1.714.533.360

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menjalankan tugas Pokok, maka harus dilakukan sinkronisasi ulang menyangkut indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Daerah. Sinkronisasi dan penyesuaian bukan sekedar dari segi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diukur dengan indikator kinerja kegiatan namun juga menyangkut pembiayaan/penganggaran ulang kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Indikator merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan capaian kinerja dalam suatu organisasi. Penggunaan indikator kinerja perlu diperhatikan jika indikator tersebut akan diterapkan dalam pemberian rekomendasi pada program yang dijalankan. Kriteria indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok organisasi meliputi : spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dan fleksibel terhadap perubahan. Mengingat program pembangunan bidang perpustakaan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non fisik, maka indikator kinerja pada masing-masing unit program tidak sama.

Indikator kinerja utama pada masing-masing program dan kegiatan yang ingin dicapai oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 11.

berikut :



Tabel II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Tercapainya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perpustakaan	indeks	75	76.61	80	85	88.5	90
		Meningkatnya Kegemaran Minat Baca Meningkat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Orang	8665	10377	12089	13801	15513	17225
		Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah		Buku	45873	52492.8	59112.6	65732.4	72352.2	78972



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

			Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Angka	0.17	0.18	0.19	0.2	0.22	0.23
			Jumlah rata-rata Pengunjung Perpustakaan Pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	722	865	1007	1150	1293	1435
			Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Buku	2500	2654	2808	2962	3116	3270
			Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki Sertifikat	Orang	29	29	30	30	31	32
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas	Pemenuhan Koleksi Kekhasan Daerah Tingkat Provinsi	Eks	-	600	1000	1400	1800	2200



	Perpustakaan yang representatif	Peningkatan pembudayaan gemar membaca, terlaksananya perpustakaan berbasis inklusi sosial dan memberikan penghargaan gerakan budaya gemar membaca di tingkat menengah data pendidikan khusus serta masyarakat	Orang	152	525	525	525	525	525
			Perpustakaan			10			
			Kab/Kota			13			
		Presentase para pengelola perpustakaan dan pustakawan serta tersusunnya data dan jumlah perpustakaan sekolah yang mendapatkan	Orang	8	9	162	12	8	12
			Perpustakaan	13	13	19	13	13	13



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

			akreditasi	Kab / Kota	<input type="text"/>					
			Pemenuhan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Eks	452	860	1313	1766	2219	2669
2		Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku (Pengelolaan Arsip secara Baku)	OPD	1	1	1	1	1	1
			Peningkatan SDM Pengelola Kerasipan	Orang	8	8	8	8	8	8



2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014. disebutkan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ditetapkan sebagaimana dalam tabel.12 sebagai berikut:



Tabel II.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Perpustakaan yang Representatif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	65%
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	65%
4.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	Persentase Pengguna Pelayanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	100%
		Persentase Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi	30%

Program		Anggaran	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	17.392.160.926
2.	Pembinaan Perpustakaan	Rp	2.855.910.450
3.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp	467.992.569
4.	Pengelolaan Arsip	Rp	1.628.559.716
5.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	190.616.650
J U M L A H		Rp	22.535.240.311



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja DISPUSAKA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Uraian Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis DISPUSAKA Tahun 2023 dijabarkan pada tabel III.1.

Tabel III.1. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis DISPUSAKA Prov.Sulteng Tahun 2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		2023	2023	
2.1.2.17	Perpustakaan			
2.1.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun (Orang)	12.089	25.064	207,32
2.1.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah (buku)	59.113	373.096	631.16
2.1.2.17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk (angka)	0.19	0.15	78.95
2.1.2.17.4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/tahun (orang)	1.007	2,089	207,44
2.1.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	2.808	68.174	2427.85



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

2.1.2.17.6	Jumlah Pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat (orang)	30	29	96,7
2.1.2.17.7	Pemenuhan Koleksi Kekhasan Daerah Tingkat Provinsi (eks)	1.000	1.060	106
2.1.2.17.8	Penghargaan gerakan budaya gemar membaca ditingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat (orang)	525	500	95,23
2.1.2.17.9	Jumlah perpustakaan yang melaksanakan kegiatan berbasis inklusi sosial (Perpustakaan)	10	5	50
2.1.2.17.10	Terlaksananya perpustakaan berbasis inklusi sosial (Kab/Kota)	13	7	53,84
2.1.2.17.11	Jumlah para pengelola perpustakaan dan pustakawan (orang)	162	150	92,59
2.1.2.17.12	Jumlah Perpustakaan sekolah yang mendapatkan akreditasi (Perpustakaan)	19	398	2.094,73
2.1.2.17.13	Terlaksananya Kegiatan gemar membaca (Kota/Kab)	13	19	146,15
2.1.2.17.14	Pemenuhan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1.313	1.706	129,93
2.1.2.18	Kearsipan			
2.1.2.18.1	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku) (OPD)	1	53	5.300
2.1.2.18.2	Peningkatan SDM Pengelola kearsipan (orang)	8	9	112,5



3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis

DISPUSAKA Tahun 2021, 2022 dan 2023 dijabarkan pada tabel III.2.

Tabel III.2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1.2.17	Perpustakaan									
2.1.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun (Orang)	1,037	17,069	1,646	12,089	26,065	216	12.089	25.064	207,32
2.1.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah (buku)	52,493	373,096	711	59,113	373,096	631	59.113	373.096	631.16
2.1.2.17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk (angka)	0.18	0.15	83	0.19	0.15	79	0.19	0.15	78.95
2.1.2.17.4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/tahun (orang)	865	1,422	164	1007	2,172	216	1.007	2,089	207,44
2.1.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	2654	68,174	2,569	2808	68,174	2,428	2.808	68.174	2427.85
2.1.2.17.6	Jumlah Pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat (orang)	29	29	100	29	38	131	30	29	96,7
2.1.2.17.7	Pemenuhan Koleksi Kekhasan Daerah Tingkat Provinsi (eks)	600	122	20	1000	249	25	1.000	1.060	106
2.1.2.17.8	Penghargaan gerakan budaya gemar membaca ditingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat (orang)	525	150	29	525	67	13	525	500	95,23
2.1.2.17.9	Jumlah perpustakaan yang melaksanakan kegiatan berbasis inklusi sosial (Perpustakaan)	9	36	400	10	45	450	10	5	50
2.1.2.17.10	Terlaksananya perpustakaan berbasis inklusi sosial (Kab/Kota)	13	13	100	13	11	85	13	7	53,84



2.1.2.17.11	Jumlah para pengelola perpustakaan dan pustakawan (orang)	142	19	13	162	93	57	162	150	92,59
2.1.2.17.12	Jumlah Perpustakaan sekolah yang mendapatkan akreditasi (Perpustakaan)	9	19	211	19	10	53	19	398	2.094,73
2.1.2.17.13	Terlaksananya Kegiatan gemar membaca (Kota/Kab)	13	5	38	13	6	46	13	19	146,15
2.1.2.17.14	Pemenuhan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	860	122	14	1313	249	19	1.313	1.706	129,93
2.1.2.18	Kearsipan									
2.1.2.18.1	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku) (OPD)	1	1	100	1	1	100	1	53	5.300
2.1.2.18.2	Peningkatan SDM Pengelola kearsipan (orang)	8	8	100	8	14	175	8	9	112,5

3.1.3 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026 dijabarkan pada tabel III.3.

Tabel III.3. Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2026	Capaian Kinerja 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3*100
2.1.2.17	Perpustakaan			
2.1.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun (Orang)	17,225	25.064	145,50
2.1.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah (buku)	78,972	373.096	472,44
2.1.2.17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk (angka)	0.23	0.15	65,21



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

2.1.2.17.4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/tahun (orang)	1,435	2,089	145,57
2.1.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	3,270	68.174	2,084,83
2.1.2.17.6	Jumlah Pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat (orang)	32	29	90,62
2.1.2.17.7	Pemenuhan Koleksi Kekhasan Daerah Tingkat Provinsi (eks)	2,200	1.060	48,18
2.1.2.17.8	Penghargaan gerakan budaya gemar membaca ditingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat (orang)	525	500	95,23
2.1.2.17.9	Jumlah perpustakaan yang melaksanakan kegiatan berbasis inklusi sosial (Perpustakaan)	12	5	41,66
2.1.2.17.10	Terlaksananya perpustakaan berbasis inklusi sosial (Kab/Kota)	13	7	53,84
2.1.2.17.11	Jumlah para pengelola perpustakaan dan pustakawan (orang)	212	150	70,75
2.1.2.17.12	Jumlah Perpustakaan sekolah yang mendapatkan akreditasi (Perpustakaan)	24	398	1.658,33
2.1.2.17.13	Terlaksananya Kegiatan gemar membaca (Kota/Kab)	13	19	146,15
2.1.2.17.14	Pemenuhan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	2,669	1.706	63,91
2.1.2.18	Kearsipan			
2.1.2.18.1	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku) (OPD)	1	53	5.300
2.1.2.18.2	Peningkatan SDM Pengelola kearsipan (orang)	8	9	112,5



3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator untuk mencapai tujuan mewujudkan pelayanan publik yang prima ini didukung adanya program perpustakaan dan kearsipan dengan sasaran meningkatkan kapasitas perpustakaan yang representatif, meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, penyelamatan dan penggunaan arsip provinsi yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk beberapa indikator yang belum mencapai target disebabkan karna masalah penganggaran yang mungkin berlebih maupun kurang sehingga dalam pelaksanaannya tidak mencapai target.

3.1.5 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran meningkatkan kapasitas perpustakaan yang representatif, meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, penyelamatan dan penggunaan arsip ini adalah sebanyak 6 (enam) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 55 (lima puluh lima) sub kegiatan, yaitu : program penunjang urusan pemerintah daerah dengan 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan, program pembinaan perpustakaan dengan 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan, program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, program pengelolaan kearsipan dengan 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan, program perlindungan dan penyelamatan arsip dengan 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan.



Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dijabarkan pada tabel III.4.

Tabel III.4. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
	1	2	3	
	Indikator	Satuan	K	Rp
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		%	100	Rp 22.535.240.311
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Peran Perpustakaan Guna Menunjang Peningkatan Kualitas SDM	%	100	Rp 20.716.063.945
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	100	Rp 17.392.160.926
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Termanfaatkannya SAKIP Perangkat Daerah	%	100	Rp 666.813.750
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	Rp 24.722.750
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	Rp 7.620.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	Rp 10.280.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	13	Rp 309.581.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	1	Rp 314.610.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Realisasi Anggaran	%	100	Rp 14.589.405.086
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	Rp 12.754.061.186



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	Rp 1.401.144.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	Rp 113.679.900
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	Rp 320.520.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp 42.920.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	Rp -
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	Laporan	1	Rp 42.920.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	1	Rp 713.868.984
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	Rp 174.733.600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	Rp 35.357.134
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	Rp 28.926.250
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1	Rp 474.852.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 198.601.806
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	Paket	1	Rp 198.601.806
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 479.775.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	Rp 434.710.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa dan Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	2	Rp 45.065.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 700.775.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	1	Rp 131.400.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	1	Rp 211.930.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	1	Rp 287.445.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan dan jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Unit	2	Rp 70.000.000
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dokumen	1	Rp 2.855.910.450
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Termanfaatkannya Dokumen Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Judul	25	Rp 1.206.955.850
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Judul Buku dalam Layanan Perpustakaan Berbasis Elektronik	Orang	12	Rp 65.295.000
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Para Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan serta Tersusunnya Data dan Informasi Perpustakaan	Dokumen	4	Rp 390.527.200



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan	Dokumen	4	Rp 231.213.250
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan	Dokumen	13	Rp 8.640.000
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Para Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan serta Tersusunnya Data dan Informasi Perpustakaan	Orang	40	Rp 288.634.000
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	989	Rp 145.134.000
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Buku yang diadakan	Eksemplar	-	-
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	Rp 77.512.400
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Termanfaatkannya Dokumen Pembudayaan Gemar Membaca, Terlaksananya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan memberikan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca di Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Dokumen	1	Rp 1.648.954.600
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Gemar Membaca dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Orang	100	Rp 418.854.800



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Peserta Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	26	Rp	29.009.500
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Dokumen Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dokumen	13	Rp	519.949.000
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Orang	26	Rp	681.141.300
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	100	Rp	467.992.569
Pelestarian karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Provinsi	Termanfaatkannya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Literatur	100	Rp	90.000.000
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Menghimpun Koleksi yang diterbitkan oleh Instansi, Penerbit, Perorangan	Orang	170	Rp	90.000.000
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	Dokumen	0	Rp	-
Penerbitan Katalog Induk Daerah / Pembuatan Sistem Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen Katalog Induk Daerah dan Jumlah Literatur Sekunder Lainnya yang di Terbitkan	Entry	0	Rp	-
Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	0	Rp	-
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	Rp	130.046.000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Peserta Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	52	Rp	86.016.000
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalimediaan Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestariakan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestariakan dan didayagunakan	Eksemplar	39	Rp	44.030.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	Rp 247.946.569
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara/Rapat Seleksi Pengadaan Literasi	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang diadakan	Eksemplar	-	-
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengolahan dan Penyiangan Bahan Koleksi	Eksemplar	300	Rp 247.946.569
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya kualitas Pelayanan dan pengelolaan Kearsipan	%	100	Rp 1.819.176.366
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip dan LKD yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik"	%	100	Rp 1.628.559.716
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Termanfaatkannya Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Laporan	1	Rp 390.713.900
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis	Arsip	1600	Rp 51.569.200
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Terpeliharanya Arsip	Arsip	1600	Rp 24.870.000
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan	Dokumen	1	Rp 314.274.700
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Termanfaatkannya Pengelolaan Arsip Statis Daerah	%	100	Rp 80.901.000
Pengumpulan dan Penyimpanan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Terkumpulnya Arsip Terjaga	Arsip	35	Rp 19.026.000
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Terpeliharanya Arsip Statis	Arsip	235	Rp 61.875.000
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Termanfaatkannya Pencipta Arsip dan LKD yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai standar	%	100	Rp 1.156.944.816



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Arsip secara Prima melalui JIKN	Kabupaten	3	Rp	103.905.866
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Pencipta Arsip dan LKD yang di awasi	60 Lks	60	Rp	1.053.038.950
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Dalam Pelestarian Arsip Daerah	%	100	Rp	190.616.650
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Termanfaatkannya Laporan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Laporan	2	Rp	25.934.550
Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Laporan Teridentifikasi Arsip Musnah	Laporan	1	Rp	22.032.000
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Laporan Terlaksananya Pemusnahan Arsip	Laporan	13356	Rp	3.902.550
Perlindungan dan penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Provinsi	Termanfaatkannya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	30	Rp	87.079.950
Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Laporan Kegiatan Pemindahan Arsip dari Lokasi Bencana	Laporan	200	Rp	34.760.000
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Laporan Kegiatan Pemindahan Arsip dari Lokasi Bencana	Laporan	100	Rp	52.319.950
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi Yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Termanfaatkannya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	%	30	Rp	26.870.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pendataan Arsip OPD yang digabung	Laporan	6	Rp	4.075.400
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pendataan Arsip OPD yang dibubarkan	Laporan	3500	Rp	4.075.400
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Pendampingan Penyelamatan Arsip secara maksimal	Tim	1500	Rp	18.720.000
Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Termanfaatkannya Laporan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Laporan	2	Rp	22.906.400
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Laporan Autentisitas Arsip	Laporan	470	Rp	17.350.000
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Laporan Penilaian Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	Laporan	450	Rp	5.556.400
Pencarian Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang	Termanfaatkannya Laporan Pencarian Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	%	30	Rp	27.824.950
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Laporan Autentisitas Arsip yang dinyatakan Hilang	Laporan	125	Rp	16.838.000
Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Laporan Autentisitas Arsip Digital Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Laporan	125	Rp	5.135.950
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Tersedianya Waktu Penetapan DPA	Laporan	125	Rp	5.851.000
			100%	Rp	22.535.240.311



3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran belanja DISPUSAKA Prov Sulteng tahun 2023 sebelum perubahan adalah Rp 20.820.706.951,00 dan setelah perubahan adalah Rp 22.535.240.311,00. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah Rp 20.254.724.648,00 atau 89,88%. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu :

f. Belanja Operasi

Anggaran dalam Belanja Operasi terdiri atas :

- Belanja Pegawai dengan besaran anggaran Rp 12.974.081.186,00 terealisasi Rp 10.829.284.775,00 atau 89,79%.
- Belanja Barang dan Jasa dengan besaran anggaran Rp 9.362.557.319,00 terealisasi Rp 9.226.851.439,00 atau 98,55%.

g. Belanja Modal

Anggaran dalam Belanja Modal terdiri atas :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan besaran anggaran Rp 198.601.806,00 terealisasi Rp 198.588.434,00 atau 99,99%.

Realisasi belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai kurang maksimal disebabkan karena adanya pejabat struktural dan fungsional yang meninggal dan pensiun.

Anggaran dan realisasi keuangan belanja tahun 2023 pada masing-masing program, kegiatan



Tabel III.5. Anggaran dan Realisasi Belanja per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

1	2		3		4	
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		%	100	Rp 22.535.240.311	89.88	Rp 20.254.724.648
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Peran Perpustakaan Guna Menunjang Peningkatan Kualitas SDM	%	100	Rp 20.716.063.945	89.26	Rp 18.492.080.874
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	100	Rp 17.392.160.926	87.50	Rp 15.217.597.085
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Termanfaatkannya SAKIP Perangkat Daerah	%	100	Rp 666.813.750	99.23	Rp 661.711.656
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	Rp 24.722.750	1	Rp 24.722.750
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	Rp 7.620.000	1	Rp 7.620.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	Rp 10.280.00	1	Rp 10.280.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	13	Rp 309.581.000	13	Rp 306.268.902
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	1	Rp 314.610.000	1	Rp 312.820.004
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Realisasi Anggaran	%	100	Rp 14.589.405.086	58.81	Rp 12.428.701.774
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	Rp 12.754.061.186	12	Rp 10.617.214.775
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	Rp 1.401.144.000	12	Rp 1.394.837.999



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	Rp 113.679.900	2	Rp 104.079.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	Rp 320.520.000	1	Rp 312.570.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp 42.920.000	1	Rp 42.920.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	Rp -	0	Rp -
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	Laporan	1	Rp 42.920.000	1	Rp 42.920.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	2	Rp 713.868.984	2	Rp 706.808.541
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	Rp 174.733.600	1	Rp 174.510.850
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	Rp 35.357.134	1	Rp 34.862.726
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	Rp 28.926.250	1	Rp 28.925.461
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	13	Rp 474.852.000	13	Rp 468.509.504
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 198.601.806	1	Rp 198.588.434
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	Paket	1	Rp 198.601.806	1	Rp 198.588.434
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 479.775.800	1	Rp 478.872.754
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	Rp 434.710.800	12	Rp 434.407.754
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa dan Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	2	Rp 45.065.000	2	Rp 44.465.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 700.775.500	1.00	Rp 699.993.926
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	1	Rp 131.400.000	1	Rp 131.400.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	1	Rp 211.930.000	1	Rp 211.257.766
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	1	Rp 287.445.500	1	Rp 287.336.160
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan dan jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Unit	2	Rp 70.000.000	2	Rp 70.000.000
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dokumen	65 %	Rp 2.855.910.450	63.95%	Rp 2.809.675.353
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Termanfaatkannya Dokumen Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Judul	1	Rp 1.206.955.850	1	Rp 1.172.671.754
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Judul Buku dalam Layanan Perpustakaan Berbasis Elektronik	Bulan	12	Rp 65.295.000	12	Rp 64.554.660
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Para Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan serta Tersusunnya Data dan Informasi Perpustakaan	Dokumen	4	Rp 390.527.200	4	Rp 384.835.702
Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan	Dokumen	4	Rp 231.213.250	4	Rp 230.763.250
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan	Dokumen	13	Rp 8.640.000	13	Rp 8.640.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Para Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan serta Tersusunnya Data dan Informasi Perpustakaan	Orang	50	Rp 288.634.000	32	Rp 267.743.742
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	750	Rp 145.134.000	750	Rp 138.702.000
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Buku yang diadakan	Eksemplar	0	Rp -	246	Rp -
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	Rp 77.512.400	1	Rp 77.432.400
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Termanfaatkannya Dokumen Pembudayaan Gemar Membaca, Terlaksananya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan memberikan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca di Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Dokumen	65%	Rp 1.648.954.600	64.53%	Rp 1.637.003.599
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Gemar Membaca dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Orang	100	Rp 418.854.800	98	Rp 412.660.160
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Peserta Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	26	Rp 29.009.500	26	Rp 29.009.500
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Dokumen Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dokumen	13	Rp 519.949.000	200	Rp 517.349.863
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Orang	26	Rp 681.141.300	210	Rp 677.984.076
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	13	Rp 467.992.569	13	Rp 464.808.436



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Pelestarian karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Provinsi	Termanfaatkannya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Literatur	170	Rp	90.000.000	960	Rp	88.676.600
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Menghimpun Koleksi yang diterbitkan oleh Instansi, Penerbit, Perorangan	Orang	170	Rp	90.000.000	960	Rp	88.676.600
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	Dokumen	0	Rp	-	0	Rp	-
Penerbitan Katalog Induk Daerah / Pembuatan Sistem Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen Katalog Induk Daerah dan Jumlah Literatur Sekunder Lainnya yang di Terbitkan	Entry	0	Rp	-	0	Rp	-
Pencetakan dan Pengiriman Bibliografi Daerah	Jumlah Pencetakan Bibliografi Daerah	Naskah	0	Rp	-	0	Rp	-
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	Rp	130.046.000	99.05	Rp	128.812.592
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Peserta Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	52	Rp	86.016.000	82	Rp	84.782.592
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalimedian Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestariakan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	39	Rp	44.030.000	35	Rp	44.030.00
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	Rp	247.946.569	99.75	Rp	247.319.244
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara/Rapat Seleksi Pengadaan Literasi	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang diadakan	Eksemplar	0	Rp	-	0	Rp	-
Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengolahan dan Penyilangan Bahan Koleksi Nusantara	Eksemplar	219	Rp	247.946.569	1227	Rp	247.319.244
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya kualitas Pelayanan dan pengelolaan Kearsipan	%	100	Rp	1.819.176.366	42.18	Rp	1.762.643.774



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip dan LKD yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik"	%	100	Rp 1.628.559.716	47.03	Rp 1.595.156.954
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Termanfaatkannya Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Laporan	100	Rp 390.713.900	98	Rp 384.497.760
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis	Arsip	1600	Rp 51.569.200	1600	Rp 51.474.050
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Terpeliharanya Arsip	Arsip	1600	Rp 24.870.000	1562	Rp 24.870.000
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan	Dokumen	60	Rp 314.274.700	90	Rp 308.153.710
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Termanfaatkannya Pengelolaan Arsip Statis Daerah	%	100	Rp 80.901.000	94.51	Rp 76.462.600
Pengumpulan dan Penyimpanan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Terkumpulnya Arsip Terjaga	Arsip	35	Rp 19.026.000	457	Rp 16.017.000
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Terpeliharanya Arsip Statis	Arsip	235	Rp 61.875.000	450	Rp 60.445.540
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Termanfaatkannya Pencipta Arsip dan LKD yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai standar	%	100	Rp 1.156.944.816	98.03	Rp 1.134.196.594
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Arsip secara Prima melalui JIKN	Kabupaten	300	Rp 103.905.866	426	Rp 97.305.646
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Pencipta Arsip dan LKD yang di awasi	60 Lks	65	Rp 1.053.038.950	78	Rp 1.036.890.948
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Dalam Pelestarian Arsip Daerah	%	30	Rp 190.616.650	26.36	Rp 167.486.820
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Termanfaatkannya Laporan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	%	30	Rp 25.934.550	21	Rp 18.269.600
Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Laporan Teridentifikasi Arsip Musnah	Laporan	470	Rp 22.032.000	526	Rp 18.269.600



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Laporan Terlaksananya Pemusnahan Arsip	Laporan	13356	Rp 3.902.550	0	Rp -
Perlindungan dan penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Provinsi	Termanfaatkannya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	30	Rp 87.079.950	28.77	Rp 83.521.950
Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Laporan Kegiatan Pemindahan Arsip dari Lokasi Bencana	Laporan	200	Rp 34.760.00	441	Rp 33.160.000
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Laporan Kegiatan Pemindahan Arsip dari Lokasi Bencana	Laporan	100	Rp 52.319.950	100	Rp 50.361.950
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi Yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Termanfaatkannya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	%	30	Rp 26.870.800	13.91	Rp 18.720.000
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pendataan Arsip OPD yang digabung	Laporan	6	Rp 4.075.400	0	Rp -
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pendataan Arsip OPD yang dibubarkan	Laporan	3500	Rp 4.075.400	0	Rp -
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Pendampingan Penyelamatan Arsip secara maksimal	Tim	1500	Rp 18.720.000	990	Rp 18.720.000
Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Termanfaatkannya Laporan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Laporan	30	Rp 22.906.400	28	Rp 21.597.360
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Laporan Autentisitas Arsip	Laporan	470	Rp 17.350.000	470	Rp 16.040.960
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Laporan Penilaian Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	Laporan	450	Rp 5.556.400	450	Rp 5.556.400



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Pencarian Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang	Termanfaatkannya Laporan Pencarian Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	%	30	Rp 27.824.950	27	Rp 25.377.910
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Laporan Autentisitas Arsip yang Dinyatakan Hilang	Laporan	125	Rp 16.838.000	125	Rp 16.040.960
Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Laporan Autentisitas Arsip Digital Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Laporan	125	Rp 5.135.950	0	Rp 5.135.950
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Tersedianya Waktu Penetapan DPA	Laporan	125	Rp 5.851.000	0	Rp 4.201.000
			100%	Rp 22.535.240.311	89,88	Rp 20.254.724.648

Berdasarkan data realisasi penyerapan DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 20.254.724.648,00,- (89,88%).

Tingkat penyerapan DPA tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi anggaran cukup efisien dalam pelaksanaan anggaran terhadap capaian keluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar, pelaksanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada TA 2023 telah terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan ketercapaian target-target kinerja pada 2023 yang mencapai 100% atau melebihi target dan realisasi anggaran pada 2023 yang mencapai 89,88 %. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target-target kinerja dan/atau dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran bersangkutan sebagaimana diuraikan di Bab 3 Akuntabilitas Kinerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023 telah berhasil melaksanakan seluruh program dan/atau kegiatan pada TA 2023 dengan anggaran akhir sebesar Rp. 20.254.724.648,00,-

Langkah selanjutnya bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah dengan tetap meningkatkan kualitas layanan serta kualitas pelaksanaan program dan/atau kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Kendala-kendala seperti *human error*, koordinasi yang kurang optimal, dan keterlambatan penyelesaian layanan diharapkan bisa diminimalisir dan diselesaikan dengan baik pada 2024.

Demikian LKIP ini disusun untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah serta sebagai bahan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan arah kebijakan pada masa yang akan datang sehingga tercipta kinerja yang sinergis, berkelanjutan dan menghasilkan outcome yang optimal.